



EDISI RABU 11 FEBRUARI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

03

POLITIK
DPR Ingatkan Risiko Layanan Kesehatan
Haji Buntut Dialihkan ke Kemenhaj

05

NUSANTARA
Purbaya-Trenggono Saling Tuding
soal Anggaran Kapal dan Galangan

10

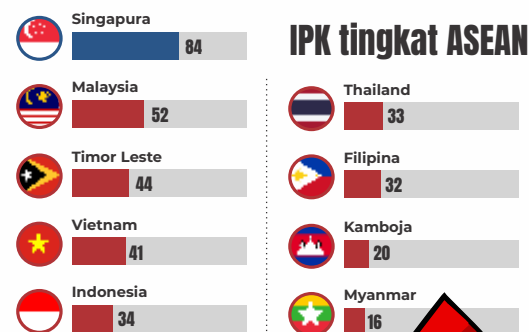
LISTSTYLE
Tak Hanya Ketiak, Area Tubuh Langganan
Berkeringat Ini Juga Wajib Dirawat

DESA PADASARI TEGAL ZONA MERAH

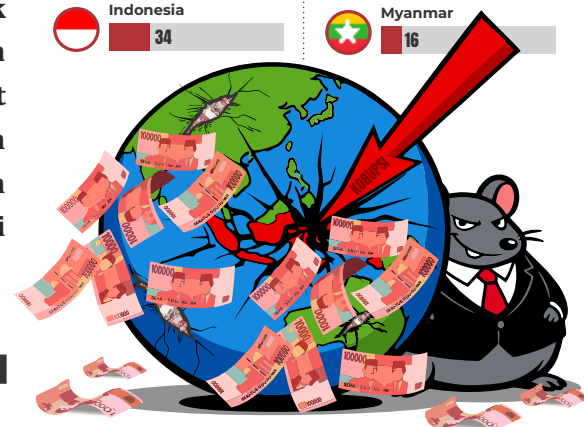
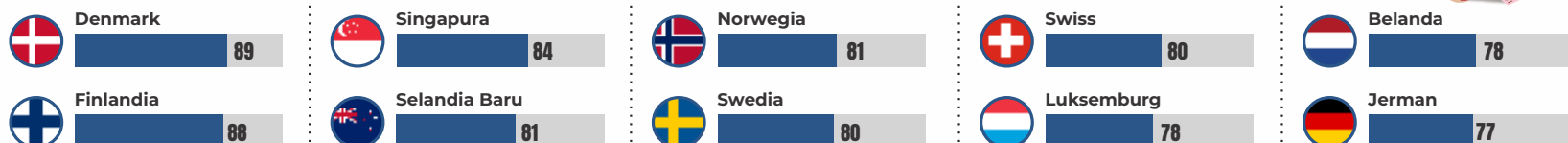
Sejumlah hunian warga beserta jaringan jalan rusak berat setelah bencana tanah bergerak menerjang Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal melaporkan sedikitnya 853 rumah terdampak, bersama 21 fasilitas umum dan tujuh rumah ibadah yang mengalami kerusakan dari kategori sedang hingga berat. Atas kondisi tersebut, Desa Padasari ditetapkan sebagai zona merah karena dinilai tidak lagi aman dan layak dihuni sebagai kawasan permukiman.(antara)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI RI JEBLOK SETARA LAOS, LEBIH BURUK DARI TIMOR LESTE

Kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi kembali mengalami kemunduran. Transparency International Indonesia (TII) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-109 dari 180 negara yang dinilai secara global. Capaian ini menurun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Indonesia masih mencatat skor 37 dan berada di peringkat ke-99 dunia. Mirisnya, hanya dalam satu tahun Indonesia anjlok sepuluh peringkat. Hal ini menandai salah satu penurunan paling tajam dalam satu dekade terakhir. Pegiat antikorupsi menilai rapor merah itu tidak dapat dilepaskan dari melemahnya prinsip checks and balances, menyusutnya independensi lembaga penegak hukum, serta berkurangnya perlindungan terhadap kebebasan sipil. Ditekankan bahwa demokrasi yang sehat memiliki korelasi langsung dengan efektivitas pemberantasan korupsi. **BACA HAL 11...**



Peringkat 10 Besar Dunia IPK Terbaru



WFA IDULFITRI ASN-SWASTA RESMI 5 HARI

Pemerintah Tegaskan Upah Tetap Dibayar, Tak Potong Cuti

Pemerintah memutuskan memberlakukan skema kerja work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement selama lima hari pada periode libur Nyepi dan Idulfitri 2026. Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja swasta dan menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi menjelang hari besar keagamaan nasional. Ditegaskan, perusahaan diminta tidak boleh memotong cuti dan tetap membayar upah pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan WFA dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus mudik, produktivitas kerja, dan daya beli masyarakat. Menurut dia, kebijakan tersebut bukan merupakan libur nasional atau cuti bersama, melainkan pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel pada tanggal-tanggal tertentu.

“Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, 27 Maret, itu 5 hari,” kata Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa



(10/2/2026).

Airlangga menyebutkan, WFA dirancang untuk menyebar pergerakan masyarakat sebelum dan setelah puncak Lebaran. Dengan pengaturan tersebut, pemerintah

berharap kepadatan lalu lintas dan lonjakan penumpang transportasi dapat ditekan, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengatur perjalanan mudik dan balik secara lebih fleksibel.

Stimulus Ekonomi Lebaran: Diskon Transportasi hingga Bansos Beras

PEMERINTAH menyiapkan paket stimulus ekonomi menjelang libur Lebaran 2026 yang mencakup diskon tarif transportasi, kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA), serta bantuan pangan bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas dan konsumsi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus Lebaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika peningkatan mobilitas masyarakat berdampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan momentum tersebut tetap terjaga tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada sistem transportasi dan distribusi logistik.

“Dalam rangka libur hari besar nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskonasi. Total anggarannya adalah Rp911,16

miliar yang berasal dari APBN maupun non-APBN,” ujar Airlangga.

Anggaran tersebut, menurut Airlangga, difokuskan terutama untuk sektor transportasi guna menekan biaya perjalanan masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp11,92 triliun untuk program bantuan pangan yang menasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada sektor transportasi, pemerintah memberikan diskon pada berbagai moda. Untuk kereta api, potongan harga sebesar 30 persen berlaku pada periode 14–29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang. Angkutan laut melalui PT Pelni juga memperoleh diskon 30 persen dari tarif dasar untuk perjalanan 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target 445 ribu penumpang.

Sementara itu, pada layanan penyeberangan, PT ASDP memberikan diskon 100 persen untuk jasa kepelabuhanan selama 12–31 Maret 2026.

Program ini ditargetkan melayani sekitar 2,4 juta penumpang dan 945 ribu unit kendaraan. Adapun angkutan udara mendapatkan potongan tarif sekitar 17–18 persen untuk kelas ekonomi pada penerbangan domestik periode 14–29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang.

Airlangga menyatakan, diskon transportasi tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi di daerah tujuan mudik. “Mobilitas masyarakat akan menjadi penggerak utama konsumsi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi daerah,” kata dia.

Untuk memperkuat daya beli masyarakat, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan selama dua bulan. Program ini menasar sekitar 5,04 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. (wid,rls,ist/dya)

STIMULUS EKONOMI LEBARAN 2026

Anggaran Total

- Rp911,16 miliar (APBN & non-APBN, fokus sektor transportasi)
- Rp11,92 triliun (Bantuan pangan masyarakat berpenghasilan rendah)

Diskon Transportasi

Kereta Api

- Diskon 30%
- Periode: 14–29 Maret 2026
- Target: 1,2 juta penumpang

Kapal Laut (Pelni)

- Diskon 30%
- Periode: 11 Maret–5 April 2026
- Target: 445 ribu penumpang

Penyeberangan (ASDP)

- Diskon 100% jasa kepelabuhanan
- Periode: 12–31 Maret 2026
- Target: 2,4 juta penumpang & 945 ribu kendaraan

Pesawat Domestik

- Diskon 17–18% (kelas ekonomi)
- Periode: 14–29 Maret 2026
- Target: 3,3 juta penumpang

WFA (Work From Anywhere)

- Berlaku: 24–27 Maret 2026
- ASN: diatur KemenPAN-RB
- Swasta: diatur Kemenaker
- Tujuan: mengurai kepadatan arus mudik

Bantuan Pangan

- 10 kg beras + 2 liter minyak goreng
- Diberikan 2 bulan
- Sasaran: 5,04 juta keluarga
- Kelompok: Desil 1–4 (masyarakat termiskin)
- Mulai disalurkan saat Ramadan

Dampak Ekonomi (Referensi 2025)

- Mobilitas Lebaran: 154,62 juta orang
- Pertumbuhan ekonomi Q4 2025: 5,39%
- Pertumbuhan ekonomi tahunan 2025: 5,11%



Selain aspek mobilitas, pemerintah menilai kebijakan WFA berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pada triwulan pertama 2026. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan pergerakan masyarakat selama periode libur panjang dinilai berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin pada pengalaman Lebaran tahun-tahun sebelumnya.

Di lingkungan pemerintahan, pelaksanaan WFA bagi ASN telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026. Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pengaturan kerja fleksibel tidak boleh mengganggu penyelenggaraan layanan publik yang bersifat esensial. (wid,rls,ant/dya)

DPR INGATKAN RISIKO LAYANAN KESEHATAN HAJI BUNTUT DIALIHKAN KE KEMENHAJ

Komisi VIII DPR RI mengingatkan risiko besar dalam pengalihan layanan kesehatan haji dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai 2026. Legislator menggarisbawahi terkait kesiapan teknis medis, pengelolaan tenaga kesehatan, keamanan data jamaah, serta efektivitas anggaran. Apalagi hal tersebut terjadi di tengah proses pembentukan kelembagaan baru yang juga mencakup pengalihan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang masih jauh dari ideal.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyoroti pengalihan layanan kesehatan haji dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Ia menilai peralihan kewenangan tersebut mengandung risiko besar dan memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak berdampak pada keselamatan serta kenyamanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.



Perhatian itu disampaikan Dini dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/2/2026), yang disiarkan secara daring. Menurut dia, layanan kesehatan haji merupakan sektor

krusial karena bersentuhan langsung dengan keselamatan jamaah, yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia dengan risiko kesehatan tinggi.

"Saya juga menaruh perhatian besar pada layanan kesehatan haji dan

operasional petugas di Arab Saudi. Dengan bergabungnya fungsi kesehatan haji pada Kementerian ini, bagaimanakah kesiapan pelaksanaan tata laksana kesehatan, alat kesehatan, maupun petugas medis agar tidak mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan jamaah," ujar Dini.

Mulai 2026, Kementerian Haji dan Umrah akan memegang kendali penuh atas penyelenggaraan layanan kesehatan haji yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kesehatan. Seiring dengan peralihan tersebut, Kemenhaj mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 miliar untuk pengadaan fasilitas kesehatan haji serta lebih dari Rp 1 triliun untuk pembiayaan tenaga dan operasional petugas kesehatan.

Dini mengingatkan bahwa pengelolaan pusat kesehatan haji tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan teknis dan tata kelola medis di lapangan. Ia menilai Kemenhaj belum memiliki rekam jejak teknis medis dalam mengelola ribuan tenaga kesehatan, sistem layanan darurat, serta distribusi obat-obatan dan alat kesehatan di luar negeri.

"Ini adalah risiko besar karena Kemenhaj belum memiliki pengalaman teknis medis dalam mengelola ribuan nakas dan obat-obatan nantinya di Arab Saudi. Ini juga menjadi tantangan dalam hal efisiensi serta pelaksanaan yang lebih terpadu," kata Dini.

Ia juga menyoroti efektivitas pemanfaatan fasilitas kesehatan haji di luar musim haji. Mengingat ibadah haji hanya berlangsung satu kali dalam setahun, Dini mempertanyakan apakah fasilitas tersebut hanya akan digunakan selama operasional haji di Arab Saudi atau juga dapat dimanfaatkan di Indonesia untuk mendukung layanan kesehatan jemaah secara berkelanjutan.

Selain persoalan layanan medis, Dini menyinggung aspek sistem informasi haji yang dinilai rawan di masa transisi kelembagaan. Pemisahan pengelolaan server dan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah dinilai berisiko tinggi terhadap stabilitas sistem dan keamanan data jamaah. (qid,rls,ant/dya)

STANDAR KESEHATAN BARU HAJI 2026

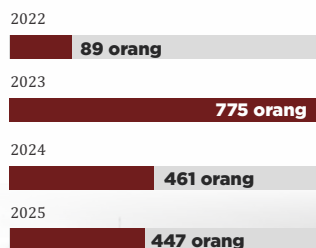
1. Sertifikat Bebas dari Penyakit

- Demensia/pikun berat.
- Gangguan saraf atau kejiwaan berat.
- Penyakit menular aktif (TBC, DBD, penyakit hemoragik).
- Gagal organ utama (jantung, paru, hati, ginjal).
- Kanker aktif dalam terapi.
- Kehamilan berisiko tinggi.

2. Vaksin Wajib

- COVID-19:** Vaksin lengkap, dosis terakhir 2021–2025, ≥14 hari sebelum berangkat
- Meningitis:** 10 hari–5 tahun sebelum tiba di Arab Saudi
- Polio:** IPV atau bOPV/novel OPV2 ≥4 minggu sebelum perjalanan (Kartu Kuning)
- Demam Kuning:** Wajib bagi usia >9 bulan

Statistik Kematian Jemaah Haji Indonesia



MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun untuk Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Tambahan anggaran tersebut dinilai mendesak menyusul keterbatasan dana rupiah murni yang tersedia saat ini. Keterbatasan itu berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik di dalam

Ajukan Tambahan Anggaran Rp 3,1 Triliun, untuk Apa?

negeri maupun di Arab Saudi.

Pengajuan tersebut disampaikan Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026), yang disiarkan secara daring melalui TVR Parlemen. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran memengaruhi pembiayaan operasional kementerian, termasuk belanja pegawai, perkantoran, serta kebutuhan teknis lainnya di tingkat pusat, daerah, dan Arab Saudi.

"Dengan kondisi keterbatasan anggaran dari dana rupiah murni untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta pemenuhan kebutuhan kelembagaan berupa belanja pegawai, belanja perkantoran, dan operasional lainnya di tingkat pusat, tingkat daerah, dan di Arab Saudi. Tentu dibutuhkan tambahan anggaran sehingga Kementerian Haji dan Umrah dapat sukses melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Gus Irfan.

Ia menyebutkan, pengajuan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan secara resmi kepada

Kementerian Keuangan sejak awal tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan anggaran belanja tambahan untuk dukungan operasional kementerian dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Kementerian Keuangan, guna memastikan seluruh fungsi pelayanan tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal dan tidak mengganggu hak-hak jemaah," ujar Gus Irfan.

"Oleh karenanya, kami pada tanggal 23 Januari 2026 telah menyampaikan surat Nomor S-5/2026 tahun 2026, hal permohonan anggaran belanja tambahan untuk dukungan operasional kementerian dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Kementerian Keuangan, guna memastikan seluruh fungsi pelayanan tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal dan tidak mengganggu hak-hak jemaah," ujar Gus Irfan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah memaparkan sejumlah faktor utama yang melatarbelakangi kebutuhan tambahan anggaran tersebut. Salah satunya adalah belum teralokasinya anggaran operasional di tingkat daerah dan di Arab Saudi, serta adanya percepatan tahapan penyelenggaraan ibadah haji. (tin,rls,ant/dya)

AKHIRNYA UTANG WHOOSH DIBAYAR APBN, RP 1,2 TRILIUN PER TAHUN

Pemerintah akhirnya memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang mengenai skema pembiayaan proyek strategis nasional yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo dan kini menjadi tanggung jawab pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menyatakan komitmen negara untuk menanggung cicilan utang proyek kereta cepat tersebut sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Komitmen itu disampaikan di tengah pembahasan restrukturisasi keuangan serta negosiasi dengan kreditur dari Tiongkok yang selama ini mendanai sebagian besar proyek.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai juru bicara Presiden, memastikan pembayaran utang Whoosh akan menggunakan kas negara. "Iya (pembayaran utang Whoosh dengan APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/1026).

Menurut Prasetyo, Istana Kepresidenan telah menerima laporan mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban keuangan proyek KCJB. Meski keputusan penggunaan APBN telah diambil, ia menyebut proses pembayaran masih berada dalam tahap pembicaraan teknis yang memerlukan perumusan lebih lanjut.

Negosiasi pelunasan utang tersebut, kata Prasetyo, dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Rosan memimpin pembicaraan teknis dengan pihak kreditur dari Tiongkok guna menyusun skema pembayaran yang dinilai paling memungkinkan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Diketahui sebelumnya, pada Oktober lalu Menteri Keuangan Purbaya menegaskan dirinya menolak mentah-mentah bila pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh menggunakan APBN.

Pembahasan restrukturisasi keuangan Whoosh juga berlangsung di tingkat kementerian. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 20 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan proyek serta opsi penanganan utang jangka panjang.

AHY menyatakan restrukturisasi keuangan dan utang KCJB masih menjadi fokus pembahasan pemerintah. "Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.



Saat itu, AHY belum menjelaskan secara rinci skema yang akan digunakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan utang Whoosh. Diskusi mengenai rencana penggunaan APBN, menurut dia, masih terus berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final yang diumumkan kepada publik.

"Mohon bersabar karena kami juga

terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab juga terkait struktur keuangan," ucap AHY.

Di sisi operator, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan persoalan utang proyek kereta cepat telah menemukan

KCIC Longgarkan Aturan Tiket: Terlambat 15 Menit Tak Hangus

PENUMPANG Kereta Cepat Whoosh kini memiliki ruang toleransi apabila tertinggal jadwal keberangkatan. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberlakukan kebijakan reschedule tiket hingga 15 menit setelah waktu keberangkatan kereta, sehingga tiket tidak otomatis hangus.

Kebijakan tersebut berlaku bagi penumpang yang terlambat akibat kemacetan, cuaca, maupun kondisi lain yang tidak terduga. Perubahan jadwal hanya dapat dilakukan secara offline melalui loket stasiun, dengan batas maksimal 15 menit setelah jadwal keberangkatan tertera pada tiket.

"Kebijakan ini dihadirkan agar penumpang tetap memiliki kesempatan melanjutkan perjalanan tanpa kehilangan tiket yang telah dibeli," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis.

KCIC mengimbau penumpang yang tertinggal kereta untuk segera menuju loket layanan dan memperhitungkan potensi antrean

agar proses reschedule dapat dilakukan tepat waktu. Untuk perubahan jadwal pada tanggal yang sama, KCIC tidak mengenakan potongan biaya. Namun, jika penumpang berpindah ke jadwal dengan tarif lebih tinggi, penumpang diwajibkan membeli tiket baru dan dana tiket sebelumnya dikembalikan. Adapun perpindahan ke tarif yang sama atau lebih murah tidak dikenai biaya tambahan, meski selisih harga tidak dikembalikan.

Meski memberi kelonggaran, KCIC tetap meminta penumpang datang lebih awal ke stasiun guna menjaga kelancaran perjalanan. "Fleksibilitas reschedule ini merupakan komitmen kami menghadirkan layanan transportasi cepat yang adaptif dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujar Eva.

Di tengah penyesuaian layanan tersebut, KCIC mencatat pertumbuhan signifikan jumlah penumpang warga negara asing (WNA) sepanjang 2025. Total

titik temu. Pemerintah, kata dia, telah memberikan solusi yang dijamin langsung oleh Presiden. "Semua sudah beres. Presiden sudah menyampaikan itu. Tata laksananya sedang dirumuskan bersama pemerintah," ujar Bobby usai rapat dengan pendapat dengan DPR RI.(wid,rls,ant/dya)

UTANG WHOOSH & PERFORMA KEUANGAN KAI

UTANG

- Jumlah utang:**
 - 7,27 miliar dolar AS (setara Rp 118,37 triliun)
 - Kurs Rp 16.283 per dolar AS, termasuk pembengkakan biaya.
- Cost overrun (pembengkakan biaya):**
 - 1,2 miliar dolar AS
- Bunga:**
 - 2% per tahun

KEPEMILIKAN SAHAM

- 40% Konsorsium:**
 - Beijing Yawan HSR Co Ltd**
(Perusahaan: CREC, CRRC, SinoHydro, CRSC, CRIC)
- 60% PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia**
Rincian :

KAI	Jasa Marga
58,53%	7,08%
Wijaya Karya	PTPN VIII
33,36%	1,03%

PERFORMA KEUANGAN

- TAHUN 2022**
 - Rp 508,9 Miliar
 - Rp 508,9 Miliar
- TAHUN 2023**
 - Rp 974 Miliar
 - Rp 500 Miliar
- TAHUN 2024**
 - Rp 4.200 Miliar
 - Rp 2.400 Miliar
- TAHUN 2025 (30 juni)**
 - Rp 1.600 Miliar
 - Rp 951,5 Miliar

■ Nilai Kerugian PT PSBI ■ Tanggungan PT KAI

penumpang WNA Whoosh mencapai 401.282 orang, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 251.525 penumpang. Secara kumulatif sejak 2023 hingga 2025, jumlah penumpang WNA telah mencapai 681.713 orang.

Menurut Eva, tren tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan wisatawan mancanegara terhadap layanan kereta cepat. "Pertumbuhan penumpang WNA yang konsisten menunjukkan bahwa layanan Whoosh semakin dipercaya wisatawan mancanegara, baik dari sisi keselamatan, kenyamanan, maupun kemudahan akses," ujarnya. (wid,rls,ist/dya)

Kegaduhan berawal dari Purbaya yang menyampaikan keheranannya saat menghadiri forum Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri

PURBAYA-TRENGGONO SALING TUDING SOAL ANGGARAN KAPAL DAN GALANGAN

Perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencuat ke ruang publik. Saling tuding dilontarkan soal pengadaan kapal perikanan dan keterlibatan industri galangan kapal nasional. Polemik ini bermula dari klaim Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dicairkan, namun belum berujung pada pemesanan ke galangan kapal dalam negeri. Hal itu langsung ditepis Trenggono. Dia menegaskan proyek pembangunan kapal yang dimaksud Purbaya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola langsung KKP



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Industri Galangan Kapal yang diselenggarakan Kadin. (Dok. Kemenkeu)

Nasional. Diketahui kegiatan diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (10/2/2026).

Dalam forum tersebut, Purbaya

mengaku menerima keluhan langsung dari pelaku industri galangan kapal yang hingga kini belum mendapatkan order pembangunan kapal dari KKP.

"Berapa dari pemda yang sudah terima order kapal dari KKP? Belum? Kan aneh, enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, order-nya enggak ada," ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran yang diajukan KKP kepada Kementerian Keuangan telah disetujui dan dilakukan pencairan.

Menurut Purbaya, kondisi itu bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja negara dan penguatan industri strategis dalam negeri. Ia mempertanyakan mengapa KKP belum merealisasikan pengadaan kapal melalui galangan domestik, padahal anggaran telah dialokasikan. "Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin," katanya.

Purbaya bahkan menyebut pemerintah dirugikan apabila dana yang bersumber dari utang negara tidak dimanfaatkan secara optimal. "Rugi saya, Pak. Sudah ngutang, dialokasikan, enggak dipakai," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung kecenderungan pembelian kapal dari luar negeri yang dinilai melemahkan industri galangan nasional.

Ia menepis alasan mahal harga kapal produksi dalam negeri yang kerap dikaitkan dengan beban pajak dan mahal bahan baku. Menurut Purbaya, persoalan tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan.

"Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam. Kan tergantung saya. Kalau itu soal pajak, saya nol-in saja, kalau perlu saya subsidi," ucapnya.

Namun ia menegaskan insentif hanya akan diberikan jika KKP memprioritaskan pembelian kapal dalam negeri. "Kalau dia beli kapal luar negeri, saya rugi, enggak mau saya," kata Purbaya. (wid,dtc,ist/dya)

GAMBARAN PERKAPALAN DI INDONESIA

1. Pembelian Kapal Luar Negeri (Impor)

- Ketergantungan impor masih tinggi karena galangan lokal belum mampu memproduksi kapal tertentu.
- Nilai impor kapal mencapai ± Rp64 triliun untuk jenis kapal dominan.
- Total impor nasional 2025: US\$ 241,86 miliar (naik 2,83% yoy).
- Impor dipicu kebijakan yang belum pro-galangan lokal dan kebutuhan teknologi kapal khusus.

2. Industri Galangan Kapal Indonesia

- Galangan aktif: 342 unit di 29 provinsi (Agustus 2025).
- Kapasitas:
- Bangun baru: 1 juta DWT/tahun.
- Reparasi: 12 juta DWT/tahun.
- Tenaga kerja: >46.000 orang.
- Konsentrasi wilayah: 65% di Batam; bahan baku/komponen banyak di Jawa.
- Utilisasi produksi masih rendah: ±42% (2025).



KETUA Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan sejumlah kemudahan dan insentif bagi industri galangan kapal. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai dukungan terhadap upaya membangkitkan kembali industri galangan kapal nasional.

Menurut Hashim, Kadin saat ini tengah menginisiasi agenda revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran nasional. Inisiatif itu akan ditopang oleh kebijakan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

"Bentuk kemudahannya apa? Bea masuk bisa saja menjadi nol persen untuk banyak komponen, lalu kapal-kapal baru yang dipesan nanti juga akan memperoleh insentif dan kemudahan lainnya," ujar Hashim usai menghadiri acara Revitalisasi

Kadin Dorong Revitalisasi, Hashim: Menkeu Siapkan Insentif

Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar Kadin di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Hashim menjelaskan, pembahasan revitalisasi galangan kapal dan pelayaran nasional dilakukan Kadin Indonesia secara tertutup bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti.

Ia menilai industri galangan kapal merupakan sektor padat karya yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Karena itu, kebangkitan industri ini dinilai berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kadin Indonesia memprakarsai acara untuk menghidupkan kembali industri galangan kapal dan pelayaran nasional. Kami melihat ada peluang agar sektor ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi,"

kata Hashim.

Selain insentif fiskal, Hashim juga menyinggung rencana pembahasan skema pembiayaan bagi industri kapal, khususnya terkait perpanjangan tenor pinjaman. Menurut dia, opsi pembiayaan dalam negeri dengan tenor lebih panjang perlu dipertimbangkan.

"Sudah disampaikan ada skema-skema, kalau bisa pinjaman dalam negeri itu tenornya lebih panjang. Dari tujuh tahun bisa menjadi 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Ini tentu harus dibahas dengan Danantara dan juga dengan Menteri Keuangan yang tadi hadir," ujar Hashim.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut pengembangan industri galangan kapal nasional memerlukan keberpihakan pemerintah agar mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Ia mengaku melihat sinyal dukungan tersebut dalam diskusi yang berlangsung. (wid,rls,ant/dya)

PR Besar Kabupaten Malang: 80 Ribu Pengangguran Didominasi Lulusan SMA/SMK

MALANG - Angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2025 ada 80.790 orang tak memiliki pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lulusan SMA dan SMK sederajat mendominasi.

"Masih ada 80.790 orang yang menganggur. Dan ini didominasi lulusan SMA dan SMK," ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Tri Darmawan, Selasa (10/2/2026).

Dijelaskannya, perhitungan TPT tersebut mengacu pada total angkatan kerja di Kabupaten Malang yang mencapai sekitar 1,53 juta orang. Secara jenjang pendidikan, Tri mengatakan lulusan SMA/SMK dinilai telah memiliki bekal untuk masuk ke dunia kerja.

Namun, menurutnya realitas di lapangan menunjukkan belum semua lulusan terserap oleh pasar kerja. "Meskipun memang, tren TPT Kabupaten Malang dalam tiga tahun

terakhir menunjukkan penurunan. Pada 2023, ada di angka 5,70 persen. Menurun menjadi 5,12 persen pada 2024, dan turun menjadi 5,00 persen pada 2025," katanya.

Kendati terjadi penurunan, Tri mengakui capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 3,8 persen. Kesenjangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menekan angka pengangguran.

Menurut Tri, salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sekolah adalah minimnya akses informasi lowongan kerja. Oleh karena itu, Disnaker mulai memfokuskan upaya pada perluasan penyebaran informasi kesempatan kerja.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIAPkerja, yang memuat informasi lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia, baik untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri.

"Sosialisasi tersebut akan menjangkau sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Malang. Kami berharap, siswa yang akan lulus sudah memiliki akses dan pemahaman mengenai peluang kerja yang tersedia," katanya.

Namun, upaya ini diakui menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal Disnaker. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Malang dan jumlah sekolah yang cukup banyak.

"Kami memiliki 144 SMK, 60 SMA, dan 89 MA. Ini menjadi tantangan kami. Karena itu, kami berharap pihak sekolah ikut berpartisipasi mengenalkan aplikasi tersebut kepada siswa," jelasnya.



Selain fokus pada penyaluran tenaga kerja, Tri juga mengoptimalkan pelatihan berbasis kewirausahaan bagi masyarakat yang belum bekerja. Pada 2026 ini, salah satu pelatihan yang disiapkan adalah pengolahan makanan menjadi abon. (Santi/Dya)

SMP Unggulan Khusus Atlet Diwacanakan Disdikbud Kota Malang



MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mewacanakan konsep SMP unggulan khusus bagi siswa berprestasi di bidang olahraga. Konsep tersebut disiapkan sebagai upaya menyeimbangkan pembinaan akademik dengan kegiatan latihan para atlet muda.

Kepala Disdikbud Kota Malang,

Suwarjana, mengatakan gagasan tersebut mirip dengan Program Sekolah Garuda, yakni sekolah unggulan berasrama yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau memang diizinkan pimpinan dan nanti juga disetujui akademisi serta masyarakat, SMP unggulan itu akan kami manfaatkan khusus untuk anak-anak yang memiliki prestasi olahraga," ujar Suwarjana, Selasa (10/2/2026).

Dinilainya, hingga saat ini belum ada SMP di Jawa Timur yang secara khusus menampung siswa dengan latar belakang prestasi olahraga dalam satu sistem pembinaan yang terintegrasi.

Karena itu, pihaknya ingin

menghadirkan konsep pendidikan yang mampu menggabungkan pembinaan akademik dan non akademik secara seimbang.

Suwarjana mencontohkan kondisi yang selama ini dialami atlet muda di Kota Malang, khususnya pada cabang olahraga renang. Banyak siswa yang harus memulai latihan sejak pukul 06.00 pagi, sementara pukul 06.30 sudah harus masuk sekolah.

Akibatnya, siswa mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi kelelahan. "Biasanya latihan selesai sekitar pukul 07.30, sudah capek, kemudian harus mengikuti pelajaran di kelas. Apakah mereka mampu menyerap pelajaran dengan optimal?" ungkapnya.

Melalui konsep SMP unggulan tersebut, Disdikbud mewacanakan adanya sistem penataan waktu yang lebih ideal antara jadwal belajar dan latihan olahraga. Dengan konsep yang mengadopsi pola berasrama seperti Sekolah Garuda, kegiatan akademik dan latihan dapat diatur secara proporsional.

"Jadi nanti pembelajarannya kapan, latihannya kapan, itu tertata. Antara akademik dan prestasi non akademik bisa seimbang," katanya.

Suwarjana juga mencontohkan pada cabang olahraga sepak bola. Menurutnya, kemampuan akademik turut berperan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Pemahaman taktik, strategi, dan cara berpikir sistematis dinilai dapat diasah melalui pendidikan formal yang baik.

Lebih lanjut, Suwarjana menyebut dalam waktu dekat Disdikbud akan menyiapkan proposal untuk diajukan kepada Wali Kota Malang. Sebagai langkah awal realisasi gagasan tersebut.

Ia mengakui, gagasan SMP unggulan khusus atlet sebenarnya telah lama menjadi bagian dari rencana program Disdikbud. Namun hingga saat ini, pihaknya belum diminta secara resmi memberikan masukan dalam bentuk nota dinas.

"Kalau memang sudah diminta, kami akan menyampaikan konsepnya ke pimpinan," tambahnya. (Santi/Dya)

DRACO MALFOY MENDADAK JADI IKON IMLEK 2026 DI CHINA

Tokoh antagonis dalam novel dan film Harry Potter, Draco Malfoy, mendadak menjadi ikon perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Wajah karakter yang diperankan aktor Inggris Tom Felton itu ramai terpampang di pintu rumah, toko, pusat perbelanjaan, hingga layar LED raksasa di sejumlah kota di China. Disebutkan, Draco Malfoy jadi lambang keberuntungan dalam perayaan Tahun Kuda.

Fenomena ini cepat menyebar dan menjadi salah satu tren budaya pop paling unik menjelang Imlek 2026. Memadukan tradisi Tiongkok dengan referensi global dari dunia film.

Popularitas tak terduga ini berawal dari permainan bunyi dan makna dalam bahasa Mandarin. Nama Malfoy dilafalkan sebagai mǎ ěr fú. Karakter “马” (mǎ) berarti kuda, sementara karakter “福” (fú) dimaknai sebagai keberuntungan atau berkah.

Tahun Baru Imlek 2026 sendiri menandai dimulainya Tahun Kuda, sehingga pelafalan nama Malfoy dianggap selaras dengan simbol tahun tersebut.

Kesesuaian fonetik inilah yang membuat karakter Draco Malfoy dipandang membawa makna positif.

Bagi sebagian penggemar, asosiasi tersebut cukup kuat untuk mengangkat Malfoy dari tokoh fiksi antagonis menjadi simbol harapan dan rezeki di tahun baru.

Dari permainan bahasa itu, tren visual pun lahir. Para penggemar Harry Potter mulai mencetak foto Tom Felton untuk dijadikan fúzi—hiasan khas Imlek berbentuk persegi berwarna merah yang lazim ditempel di pintu atau dinding rumah. Biasanya, fúzi hanya menampilkan satu huruf “福”, namun kini digantikan potret Draco Malfoy yang tetap dimaknai sebagai pembawa hoki.

Tak sedikit pula yang memasang fúzi Malfoy secara terbalik. Dalam tradisi Tionghoa, kata “terbalik” (dào) memiliki pelafalan yang sama dengan kata “datang” (dào). Karena itu, simbol

keberuntungan yang dipasang terbalik dipercaya sebagai pesan bahwa rezeki dan keberuntungan akan segera tiba.

Keunikan tren ini semakin terasa karena latar belakang karakter Draco Malfoy sebagai anggota asrama Slytherin, yang identik dengan simbol ular. Tahun shio ular sendiri berakhir pada pertengahan Februari 2026 sebelum digantikan oleh Tahun Kuda. Bagi sebagian penggemar, Draco dianggap “mewakili” dua shio sekaligus, menandai peralihan simbolik dari

satu tahun ke tahun berikutnya.

Fenomena ini dengan cepat meluas di media sosial China, terutama di platform Xiaohongshu. Tren bermula dari unggahan seorang penggemar Harry Potter yang membagikan desain fúzi bergambar Draco Malfoy pada pertengahan Januari. Unggahan tersebut viral dan memicu gelombang kreativitas serupa dari pengguna lain.

Dari ruang digital, tren kemudian merambah ke ruang komersial. Berbagai produk bertema Malfoy mulai dijual di Xiaohongshu dan platform belanja daring lainnya, mulai dari hiasan Imlek, magnet kulkas, hingga dudukan ponsel. Salah satu penjual dilaporkan menawarkan magnet kulkas bergambar Malfoy seharga 27 yuan atau sekitar Rp65 ribu, dan tercatat telah terjual lebih dari 5.000 unit.

Wajah Draco Malfoy juga terlihat terpampang di spanduk pusat perbelanjaan hingga layar LED besar di ruang publik. Tren ini bahkan menarik perhatian langsung Tom Felton. Pada pekan lalu, aktor berusia 38 tahun itu mengunggah ulang video dari China yang memperlihatkan fotonya tampil di layar LED sebuah mal, disertai tulisan bermakna “kesadaran magis yang menarik seratus macam rezeki.” (cna,ist,gus/dya)

Libur Imlek Terpanjang Sepanjang Sejarah



Gambaran warga China saat bersiap mengejar kereta di Stasiun Kereta Api Utara di Shenzhen di Provinsi Guangdong, pada Imlek 2023. (DokAP)

PERAYAAN Tahun Baru China atau Imlek 2026 akan berlangsung lebih panjang dari biasanya. Pemerintah China menetapkan masa libur selama sembilan hari bagi pabrik dan para pekerja, dimulai satu hari sebelum Imlek yang jatuh pada 17 Februari 2026.

Kebijakan ini menjadikan libur Imlek tahun ini sebagai yang terpanjang dalam sejarah negara tersebut.

“Menurut pemberitahuan dari Kantor Umum Dewan Negara, libur Festival Musim Semi (Imlek) pada tahun 2026 berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Februari,

dengan total 9 hari libur,” dikutip dari pernyataan resmi yang dirilis oleh Kantor Umum Dewan Negara Republik Rakyat China dalam pengumuman jadwal libur nasional 2026.

Mengutip laman china-briefing.com, libur Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek ditetapkan berlangsung pada 15 hingga 23 Februari 2026, dengan total sembilan hari waktu istirahat. Situs

tersebut menyebutkan bahwa durasi libur kali ini menjadi yang terlama sejak perayaan Imlek diberlakukan sebagai hari libur nasional.

Dalam tradisi masyarakat Tiongkok, Imlek bukan sekadar perayaan satu hari. Persiapannya berlangsung panjang dan sarat makna. Laman wisata chinahighlights.com menjelaskan bahwa rangkaian Tahun Baru Imlek dirayakan selama 16 hari, dimulai dari Malam Tahun Baru Imlek hingga Festival Lentera China.

Persiapan menyambut Imlek

sendiri sudah dimulai sekitar setengah bulan sebelum Malam Tahun Baru. Sejumlah aktivitas pada periode ini merupakan tradisi turun-temurun, meski sebagian lainnya berkembang seiring waktu.

Salah satu rangkaian awal adalah Festival Laba, yang berlangsung pada 26 Januari hingga 3 Maret 2026. Festival ini menandai dimulainya Festival Musim Semi.

Pada tahun ini, Festival Laba jatuh pada 26 Januari. Kegiatan utamanya meliputi doa kepada leluhur dan para dewa, seperti dewa pintu, dengan harapan memperoleh rezeki dan panen yang baik. Bubur Laba menjadi hidangan khas pada perayaan tersebut. (voa,cbri,ist/dya)



Boneka kuda 'depresi' dengan wajah menangis dipajang menyambut Tahun Kuda menjelang Tahun Baru Imlek China di Yiwu International Trade City, China. (REUTERS)



Wajah aktor Tom Felton saat berperan sebagai karakter Draco Malfoy dalam waralaba film Harry Potter menjadi ikon Imlek di China pada 2026. (Foto: X/@ww_direct)



TANDA KOMUNIKASI SEHAT ANTARA ORANGTUA DAN ANAK REMAJA

Masa remaja merupakan fase perkembangan dan perubahan bagi anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Anak mulai membangun identitas diri, menguji Batasan, dan mencari kemandirian. Komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak remaja menjadi fondasi penting untuk menjaga hubungan keluarga tetap harmonis dan suportif.

Pola komunikasi yang tepat tidak hanya membantu orang tua memahami kebutuhan emosional anak, tetapi memberi ruang aman bagi remaja untuk mengespresikan diri. Sejumlah ahli parenting menekankan bahwa hubungan komunikasi yang positif berkontribusi besar terhadap kesehatan mental, rasa percaya diri, serta kemampuan anak dalam mengambil keputusan yang bertanggungjawab.

Lalu bagaimana cara mengetahui apakah komunikasi antara orang tua dan anak remaja sudah sehat? Yuk, simak tanda-tandanya berikut ini.

Orangtua Mampu Mendengarkan Secara Aktif

Salah satu ciri komunikasi sehat adalah kemampuan orang tua untuk mendengarkan secara aktif. Orang tua yang mendengarkan dengan empati membuat remaja merasa dihargai dan lebih terbuka untuk berbagi cerita, termasuk masalah pribadi.

Dialog terbuka tentang topik apapun

Komunikasi sehat ditandai dengan adanya dialog dua arah yang terbuka. Dalam keluarga dengan komunikasi yang baik, anak remaja merasa bebas mengemukakan pendapat, perasaan,

maupun pandangan mereka tanpa rasa takut disalahkan.

Topik pembicaraan pun tidak terbatas pada hal-hal ringan, tetapi juga mencakup isu sensitif seperti tekanan akademik, pergaulan, penggunaan media sosial, hingga relasi personal. Keterbukaan ini memungkinkan orang tua untuk memberikan arahan secara bijak tanpa terkesan menggurui.

Adanya Rasa Saling Menghormati

Rasa hormat menjadi elemen penting dalam komunikasi antara orang tua dan remaja. Ketika orang tua menghargai pendapat anak, meskipun tidak selalu sejalan, anak akan belajar bahwa pandangannya memiliki nilai.

Kehadiran Emosional yang Konsisten

Kehadiran orang tua tidak hanya diukur dari seberapa sering berada di rumah, tetapi juga dari keterlibatan emosional yang diberikan. Kehadiran emosional berarti orang tua peka terhadap perubahan suasana hati anak dan siap memberikan dukungan saat dibutuhkan.

Tersedianya Waktu Berkualitas Bersama

Kesibukan orang tua sering kali menjadi penghalang utama dalam membangun komunikasi yang sehat. Namun, meluangkan waktu berkualitas bersama anak, meskipun singkat, dapat memberikan dampak yang signifikan.

Aktivitas sederhana seperti makan bersama, berbincang santai, atau melakukan hobi keluarga dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat ikatan emosional.

Penyelesaian Konflik dengan Cara yang Sehat

Konflik antara orang tua dan remaja merupakan hal yang wajar. Perbedaan sudut pandang sering kali memicu pertengkaran kecil hingga besar. Namun, komunikasi yang sehat tercermin dari cara konflik tersebut diselesaikan. Orang tua yang mampu mengelola emosi, mendengarkan sudut pandang anak, serta bersedia mengakui kesalahan jika diperlukan, memberi contoh positif tentang penyelesaian masalah.

Memberikan Ruang bagi Kemandirian Anak

Ciri lain dari komunikasi yang sehat adalah kesediaan orang tua untuk memberi ruang bagi anak dalam mengambil keputusan. Remaja perlu belajar mandiri, bereksperimen, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Orang tua tetap berperan sebagai pembimbing, bukan pengendali penuh. Dengan memberikan kepercayaan yang proporsional, anak akan merasa dipercaya dan terdorong untuk bersikap lebih terbuka dalam berkomunikasi. Di era digital seperti saat ini, tantangan komunikasi antara orang tua dan remaja semakin kompleks.

Paparan media sosial, arus informasi yang cepat, serta tekanan dari lingkungan pertemanan dapat memengaruhi cara remaja berpikir dan berperilaku. Kondisi ini menuntut orang tua untuk lebih adaptif, tidak hanya dalam menyampaikan nasihat, tetapi juga dalam memahami dunia yang sedang dijalani anak. Dengan komunikasi yang terbuka dan penuh empati, orang tua dapat menjadi

tempat berpulang yang aman bagi remaja di tengah berbagai perubahan yang mereka alami.

Para ahli juga menilai bahwa komunikasi yang sehat tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang konsisten dan berkelanjutan. (Nabillatul- UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)

Fakta-fakta kesehatan mental remaja di Indonesia

Kasus gangguan emosional pada remaja meningkat signifikan. Menurut data 1 dari 3 remaja Indonesia atau sekitar 15,5 juta jiwa mengalami masalah kesehatan mental dan gangguan kecemasan

Peningkatan Prevalensi:

Berdasarkan survei I-NAMHS (Indonesia National Adolescent Mental Health Survey), sekitar 2,45 juta remaja terdiagnosis mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Kenaikan Angka Bunuh Diri:

Terdapat laporan bahwa angka percobaan bunuh diri di kalangan remaja meningkat hampir tiga kali lipat hingga awal 2026.

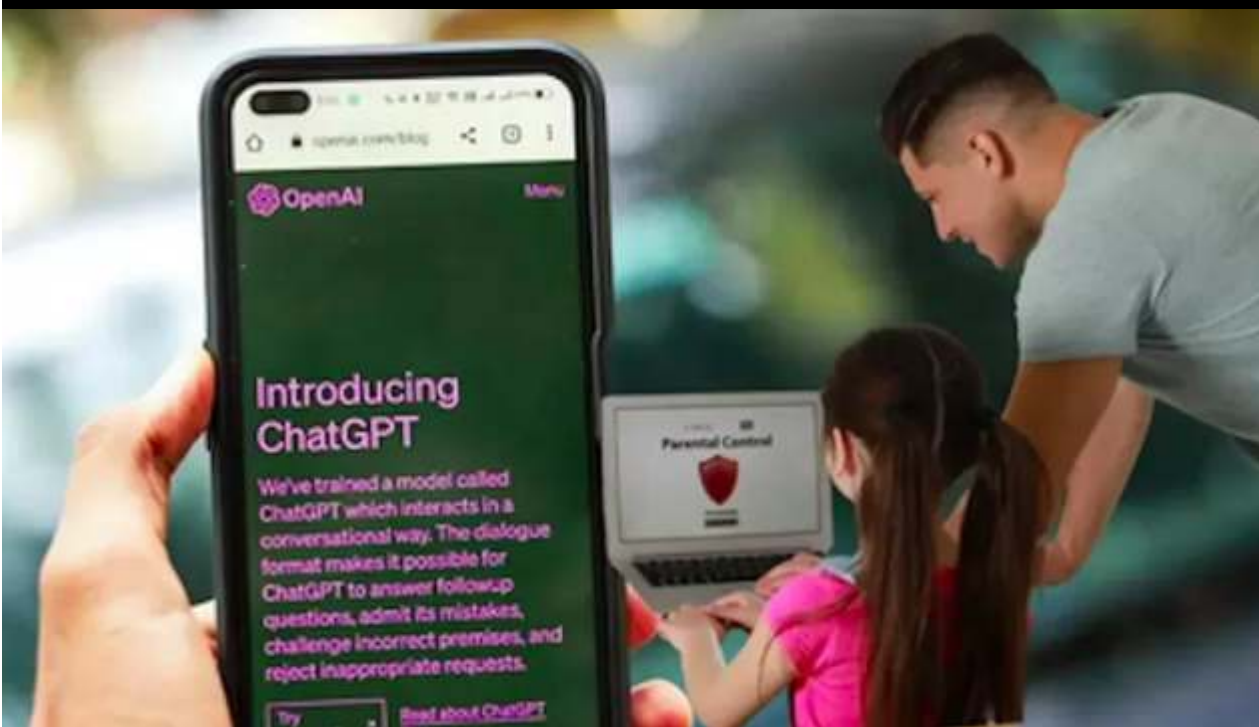
Jenis Gangguan Umum:

Masalah yang paling sering muncul meliputi gangguan kecemasan (anxiety), depresi, gangguan makan, dan ADHD.

Dampak Pandemi & Pasca-Pandemi:

Transisi dari isolasi sosial saat pandemi ke tuntutan akademik yang tinggi kembali memperburuk kondisi kesehatan mental akibat kelelahan emosional dan kurangnya strategi coping yang sehat.

Ada Fitur Prediksi Usia di ChatGPT untuk Keamanan Anak



OpenAI resmi merilis fitur baru di ChatGPT yang dapat memperkirakan usia penggunanya. Fitur ini dibuat sebagai langkah perlindungan bagi anak-anak dan remaja, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap generasi muda. Melalui keterangan resminya, OpenAI menyebutkan bahwa fitur "age prediction" bertujuan untuk membantu mengidentifikasi pengguna yang masih di bawah umur, sekaligus membatasi konten yang mereka akses agar lebih aman dan sesuai usia.

Dalam beberapa waktu terakhir, OpenAI sering menjadi sorotan karena penggunaan ChatGPT oleh anak-anak dan remaja. Bahkan, sejumlah laporan

mengaitkan kasus bunuh diri remaja dengan interaksi mereka bersama chatbot tersebut. Selain itu, seperti penyedia AI lainnya, OpenAI juga mendapat kritik karena ChatGPT sempat memungkinkan pembahasan bertema seksual dengan pengguna muda. Pada April tahun lalu, perusahaan ini harus memperbaiki celah yang membuat ChatGPT bisa menghasilkan konten erotis untuk pengguna di bawah 18 tahun.

OpenAI menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengguna di bawah umur sebenarnya sudah lama menjadi fokus mereka. Kehadiran fitur prediksi usia ini disebut sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengamanan yang sudah ada sebelumnya. Dikutip dari TechCrunch, OpenAI menjelaskan bahwa fitur ini bekerja dengan memanfaatkan

algoritma AI untuk menganalisis berbagai sinyal dari perilaku dan data akun pengguna.

Sinyal yang dianalisis meliputi usia yang diinput oleh pengguna, lamanya akun dibuat, serta pola waktu akun tersebut aktif. Jika sistem memprediksi bahwa sebuah akun digunakan oleh pengguna di bawah usia 18 tahun, maka filter konten akan otomatis diterapkan. Filter ini berfungsi untuk menyaring topik sensitif, seperti seks, kekerasan, dan pembahasan lain yang dianggap tidak sesuai untuk anak dan remaja. Meski begitu, OpenAI juga menyediakan skema pemulihan apabila terjadi kesalahan. Jika pengguna dewasa salah terdeteksi sebagai di bawah umur, mereka dapat mengajukan pemulihan status akun

dengan melakukan verifikasi identitas. Proses ini dilakukan dengan mengirimkan swafoto atau selfie melalui mitra verifikasi identitas OpenAI, yaitu Persona. (Inna - UINSA berpartisipasi dalam tulisan)

sisanya akan diatuhkan ke kawasan ini.

NASA dan mitra internasionalnya berupaya memastikan bahwa akhir masa tugas ISS tidak menimbulkan risiko keselamatan, dan Point Nemo dianggap sebagai lokasi paling aman di Bumi untuk tujuan tersebut. Meski jarang dikunjungi dan hampir tidak dikenal publik, Point Nemo akan menjadi saksi bisu berakhirnya salah satu proyek ilmiah terbesar umat manusia. Di titik paling sunyi di planet ini, ISS simbol kolaborasi global dan eksplorasi antariksa akan mengakhiri perjalanannya. Selain sebagai langkah proteksi, fitur prediksi usia ini juga menjadi bagian dari upaya OpenAI untuk menyesuaikan layanan ChatGPT dengan regulasi perlindungan anak yang semakin ketat di berbagai negara.

Sejumlah pemerintah dan lembaga pengawas teknologi menuntut perusahaan AI agar lebih bertanggung jawab dalam memastikan produknya tidak menimbulkan risiko psikologis maupun sosial bagi pengguna muda. Dengan adanya sistem penayangan otomatis berbasis usia, OpenAI berharap dapat menekan potensi penyalahgunaan teknologi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan AI secara lebih aman dan etis.

Di sisi lain, pengembangan fitur ini juga memicu diskusi mengenai privasi dan transparansi data pengguna. Perusahaan menegaskan akan terus mengevaluasi efektivitas fitur "age prediction" ini, seiring dengan masukan dari pengguna, peneliti, serta regulator, agar ChatGPT dapat digunakan secara bertanggung jawab oleh semua kalangan. (Itqiyah, UINSA yang berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG: SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO: IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL.
RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Tak Hanya Ketiak, Area Tubuh Langganan Berkeringat Ini Juga Wajib Dirawat

Berkeringat merupakan proses alami tubuh untuk menjaga suhu tetap stabil. Saat suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat akan menghasilkan cairan yang membantu mendinginkan tubuh.

Meski demikian, produksi keringat yang berlebihan atau tidak terkelola dengan baik kerap menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan memicu bau badan.

Selama ini perhatian masyarakat umumnya tertuju pada area ketiak sebagai sumber utama keringat dan bau badan. Selain itu, sejumlah bagian tubuh lain juga aktif berkeringat dan membutuhkan perawatan khusus.

Kurangnya perhatian terhadap area-area tersebut dapat menyebabkan kelembapan berlebih, iritasi kulit, hingga pertumbuhan bakteri.

Salah satu area yang sering mengalami kondisi tersebut adalah punggung, leher, lipatan tubuh, dan telapak kaki. Punggung dengan permukaan yang luas dan sering tertutup pakaian punggung mudah menjadi lembap, terutama ketika seseorang banyak bergerak atau berada di lingkungan panas.

Bahan alami untuk mengatasi keringat berlebih dan bau badan

Tawas:

Memiliki sifat astringent untuk mengecilkan pori-pori dan antibakteri untuk mengontrol bau.

Lemon atau Jeruk Nipis:

Kandungan asamnya membantu membunuh bakteri penyebab bau badan.

Cuka Apel:

Membantu menyeimbangkan pH kulit dan mengurangi produksi keringat berlebih.

Tomat:

Sifat asam dan astringent pada tomat dapat mengecilkan pori-pori.

Daun Sirih & Kemangi:

Dikenal sebagai antiseptik alami. Daun sirih bisa direbus untuk air mandi.

Baking Soda:

Dapat menyerap kelembapan dan menetralkan bau badan dengan cepat.

Keringat yang tidak segera dibersihkan dapat menimbulkan rasa lengket dan bau tidak sedap. Menjaga kebersihan punggung dengan mandi setelah berkeringat dan memilih pakaian yang longgar serta menyerap keringat menjadi langkah sederhana yang kerap terlupakan, dan dampaknya sangat terasa bagi kenyamanan tubuh.

Leher pun juga sama, area ini menjadi titik pertemuan panas dari kepala dan tubuh, sehingga mudah berkeringat. Dalam kondisi cuaca panas atau saat menggunakan pakaian tertutup, leher terasa basah dan tidak nyaman.

Jika dibiarkan, kelembapan di leher berpotensi menimbulkan rasa gatal atau iritasi. Menjaga leher tetap kering dengan menyekanya secara lembut setelah berkeringat dan memastikan kebersihannya saat mandi dapat membantu mengurangi masalah tersebut.

Perhatian juga perlu diberikan pada lipatan tubuh. Area seperti bawah payudara, lipatan perut, siku bagian dalam, dan belakang lutut sering kali menjadi tempat keringat karena minimnya sirkulasi udara. Kondisi lembap yang berlangsung lama dapat memicu bau tidak sedap dan masalah kulit. Menjaga area lipatan tetap bersih dan benar-benar kering setelah mandi, serta mengganti pakaian yang lembap merupakan kebiasaan kecil yang berperan besar dalam menjaga kesehatan kulit.

Pada bagian kaki khususnya telapak kaki juga termasuk bagian tubuh yang aktif berkeringat. Sepatu tertutup yang dipakai dalam waktu lama membuat telapak kaki mudah berkeringat. Tak heran jika bau kaki menjadi keluhan banyak orang.

Membersihkan kaki secara rutin serta membersihkan atau menjemur sepatu sebelum digunakan dapat membantu mengurangi masalah bau keringat pada telapak kaki.

Jaga kebersihan

Menjaga kebersihan adalah langkah pertama dan paling penting dalam merawat area lipatan tubuh. Mandilah secara teratur dua kali sehari, terutama setelah beraktivitas yang membuat tubuh berkeringat. Gunakan sabun yang lembut. Pilih sabun yang tidak mengandung bahan kimia keras agar kulit tidak iritasi. Terakhir setelah mandi, pastikan area lipatan tubuh dikeringkan dengan baik untuk

mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri.

Eksfoliasi rutin

Eksfoliasi membantu mengangkat kulit sel kulit mati yang dapat menyebabkan kulit tampak gelap. Gunakan scrub alami yang terbuat dari bahan l seperti gula atau oatmeal. Jenis ini bisa menjadi pilihan yang lembut. Lakukan eksfoliasi 1-2 kali seminggu, tergantung pada sensitivitas kulit masing-masing.

Pilih pakaian yang tepat

Pilih pakaian yang menyerap keringat: bahan seperti katun dapat menyerap keringat dan menjaga kulit tetap kering. Hindari pakaian ketat karena dapat menyebabkan gesekan yang berlebihan dan iritasi pada kulit.

Hindari penggunaan deodorant beralkohol

Pilih deodorant alami yang bebas alkohol dan pewangi buatan. Lebih disarankan memakai yang mengandung bahan pelembab sehingga bisa membantu menjaga kulit tetap lembut.

Perawatan tubuh tidak hanya bergantung pada produk. Kebiasaan hidup sehari-hari memegang peran penting dalam mengelola keringat. Mandi secara teratur, memilih bahan pakaian yang menyerap keringat, serta segera mengganti pakaian setelah beraktivitas berat merupakan bagian dari pola hidup bersih yang sering kali diabaikan. Langkah-langkah sederhana tersebut mampu menjaga tubuh tetap kering dan nyaman sepanjang hari.

Berkeringat bukanlah sesuatu yang perlu dihindari atau disembunyikan. Berkeringat adalah tanda bahwa tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman bahwa setiap bagian tubuh memiliki perannya masing-masing dan memerlukan perhatian yang setara. Dengan perawatan yang tepat dan kebiasaan yang baik, keringat tidak lagi menjadi sumber ketidaknyamanan, melainkan bagian alami dari tubuh yang sehat. (Nabilla - UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)



Indeks Persepsi Korupsi RI ...dari hal 1

Manager Program Transparency International Indonesia, Ferdian Yazid, menyampaikan bahwa penurunan skor dan peringkat Indonesia mencerminkan stagnasi bahkan kemunduran dalam agenda pemberantasan korupsi di sektor publik. "Skor Indonesia di tahun ini ada di angka 34, kemudian peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya, peringkat Indonesia ada di peringkat 109," kata Ferdian, Selasa (10/2/2026).

"Untuk peringkat negara Indonesia dalam CPI, penurunannya cukup besar dari peringkat 99 di tahun 2024 menjadi 109 di tahun 2025," ujarnya.

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara tetangga. Singapura tetap menjadi negara dengan skor tertinggi di kawasan dengan nilai 84, sekaligus masuk tiga besar dunia. Malaysia berada di posisi berikutnya dengan skor 52, disusul Timor Leste dengan skor 44 dan Vietnam dengan skor 41.

Indonesia berada di peringkat kelima kawasan dengan skor 34, sejajar dengan Laos. Di bawah Indonesia terdapat Thailand (33), Filipina (32), Kamboja (20), dan Myanmar (16). Dengan posisi ini, Indonesia masih berada di kelompok negara dengan tingkat persepsi korupsi tinggi di Asia Tenggara.

Ferdian menjelaskan bahwa IPK disusun berdasarkan kompilasi berbagai sumber data internasional yang menilai persepsi korupsi di sektor publik. Indikator yang digunakan mencakup praktik penyuapan, pengalihan anggaran publik untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, serta efektivitas pemerintah dalam mencegah dan menindak korupsi.

Selain itu, IPK juga menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pelapor, jurnalis, dan penyelidik yang mengungkap kasus korupsi, serta keterbukaan akses masyarakat sipil terhadap informasi publik. "Hingga perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi serta akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik," kata Ferdian.

Namun, Ferdian menegaskan bahwa IPK tidak mengukur pengalaman langsung warga negara dalam menghadapi praktik korupsi. Indeks ini juga tidak mencakup besaran kerugian negara, praktik pencucian uang, aliran dana ilegal lintas negara, penipuan pajak, maupun aktivitas ekonomi informal.

Dalam laporan tahun ini, TII juga mencatat adanya tren kemunduran pemberantasan korupsi secara global. Dalam satu dekade terakhir, jumlah negara dengan skor IPK di atas 80 terus menyusut. "Di tahun ini, hanya ada lima negara. Jadi mulai banyak kemunduran komitmen pemberantasan korupsi di tingkat global," ujar Ferdian.

Lima negara dengan skor tertinggi tersebut didominasi kawasan Eropa Utara dan Asia Pasifik. Denmark berada di posisi pertama dunia dengan skor 89, diikuti Finlandia dengan skor 88. Singapura menempati peringkat ketiga global dengan skor 84. Selanjutnya terdapat Selandia Baru dan Norwegia yang masing-masing mencatat skor 81.

Di kelompok sepuluh besar dunia juga terdapat Swedia dan Swiss dengan skor 80, Luksemburg dan Belanda dengan skor 78, serta Jerman dengan skor 77. Negara-negara tersebut secara konsisten dinilai memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang relatif transparan dan mekanisme pengawasan yang kuat.

Sebaliknya, negara-negara dengan skor terendah umumnya berasal dari kelompok fragile state yang mengalami konflik berkepanjangan, ketidakstabilan politik, dan lemahnya institusi negara. Ferdian menyebut Venezuela, Somalia, dan Sudan Selatan sebagai

contoh negara dengan tingkat persepsi korupsi paling buruk secara global.

"Misalnya yang paling rendah ada Venezuela, lalu ada juga Somalia dan Sudan Selatan. Jadi negara yang berkonflik biasanya juga rentan terhadap praktik korupsi," katanya.

Selain Laos, Indonesia tercatat memiliki skor yang sama dengan sejumlah negara lain, antara lain Aljazair, Malawi, Nepal, Sierra Leone, serta Bosnia dan Herzegovina. Kesamaan skor ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan dan integritas sektor publik.

Melemahnya Komitmen Antikorupsi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai capaian IPK Indonesia pada 2025 menunjukkan kemunduran serius dalam pemberantasan korupsi dan kualitas demokrasi. Menurut dia, posisi Indonesia yang sejajar dengan Laos dan berada di bawah Timor Leste merupakan sinyal kuat melemahnya komitmen reformasi antikorupsi.

"Saya cukup miris melihat Indonesia hanya setara dengan Laos dan berada di bawah Vietnam, berada di bawah Malaysia, apalagi Singapura. Bahkan berada di bawah negara baru Timor Leste yang dulu sempat menjadi salah satu provinsi terkorup dan

termiskin di Indonesia," kata Usman dalam peluncuran Corruption Perception Index 2025 secara virtual.

Usman menilai, penurunan skor IPK tidak dapat dilepaskan dari melemahnya prinsip checks and balances, menyusutnya independensi lembaga penegak hukum, serta berkurangnya perlindungan terhadap kebebasan sipil. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat memiliki korelasi langsung dengan efektivitas pemberantasan korupsi.

"Indeks TII ini menunjukkan satu kemunduran demokrasi yang saya kira kembali memprihatinkan. Karena demokrasi Indonesia dalam pemberantasan korupsi misalnya tidak lagi kuat, tidak lagi kuat dalam menekan korupsi," ujarnya.

Menurut Usman, temuan IPK seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan antikorupsi, penegakan hukum, serta kemandirian peradilan dinilai mendesak untuk dilakukan.

"Temuan indeks persepsi korupsi dari Transparency International ini harus dijadikan semacam otokritik dan juga bahan evaluasi yang serius bagi Indonesia di dalam membenahi pemberantasan korupsi, kemunduran demokrasi, dan juga kemandirian peradilan," kata Usman. (wid,rls,kcm,kum/dya)

Kajian KPK: 22 Persen Pengadilan Bermasalah

SEBANYAK 22 persen pengadilan di Indonesia tercatat menghadapi persoalan serius terkait ketidak-konsistenan dalam penetapan susunan majelis hakim. Fakta ini tercantum dalam hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020 berjudul "Tantangan Integritas di Balik Proses Peradilan" dan dinilai masih relevan, terlebih setelah terungkapnya operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dalam kajian tersebut ditemukan 22 persen pengadilan tidak konsisten dalam menentukan majelis hakim, sebuah kondisi yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan sekaligus membuka celah terjadinya intervensi serta praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (10/2/2026).

Selain masalah penetapan majelis hakim, KPK juga menyoroti kendala dalam pelaksanaan eksekusi perkara. Dari hasil pemetaan terhadap 60 pengadilan tingkat pertama, sebanyak 34,92 persen tercatat mengalami hambatan

eksekusi yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Permasalahan juga ditemukan dalam aspek administrasi peradilan. Sekitar 30 persen data eksekusi pada 13 pengadilan tidak tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kondisi ini dinilai menyulitkan proses pengawasan serta menurunkan tingkat akuntabilitas lembaga peradilan. KPK juga mencatat adanya ketidak-tertiban dalam pengelolaan uang panjar perkara, yang berimplikasi pada lemahnya transparansi serta pengendalian internal.

Kajian tersebut turut mengungkap ketimpangan distribusi beban kerja hakim yang mencapai 46 persen. Ketidakseimbangan ini dinilai berpengaruh terhadap kualitas putusan serta efektivitas penanganan perkara di pengadilan.

"Dalam situasi tersebut, praktik pungutan liar masih ditemukan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta pengendalian konflik kepentingan," ujar Budi.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, KPK telah menyampaikan enam rekomendasi strategis kepada

para pemangku kepentingan di sektor peradilan. Rekomendasi tersebut mencakup pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penetapan majelis hakim, penetapan standar waktu penyelesaian setiap tahapan eksekusi perkara perdata, kebijakan distribusi hakim yang lebih merata, pengawasan berkala oleh Badan Pengawasan, optimalisasi pertukaran data antar aparat penegak hukum, serta pengaturan standar dokumentasi dan tata cara perekaman, termasuk penggunaan CCTV sebagai sarana pengawasan.

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, serta penguatan integritas.

"Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesadaran bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan, demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih, profesional, dan berkeadilan," tutur Budi. (wid,rls,ant/dya)



DPRD SURABAYA BERI CATATAN SOAL PARKIR NON-TUNAI

ARIF FATHONI: JALANKAN DENGAN SERIUS DAN TRANSPARAN



(Ilustrasi) Penerapan parkir nontunai di Kota Surabaya. (Dok.HumasSurabaya)

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai kebijakan penerapan parkir non-tunai dan pembentukan Satgas Antipreman merupakan langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 'Jurus' tersebut diyakini bisa membenahi persoalan parkir tepi jalan yang selama ini menuai keluhan publik.

Ditegaskan, keluhan masyarakat di media sosial (medsos) terkait praktik parkir yang dinilai tidak transparan menjadi momentum penting bagi Pemkot untuk melakukan reformasi menyeluruh.

"Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni, Selasa (10/2/2026).

Ia menuturkan, kebijakan parkir non-tunai harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Selain itu juga disertai langkah-langkah implementatif di lapangan. Fathoni meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan memastikan kesiapan teknis dan sumber daya.

Salah satu langkah konkret yang menurut Fathoni wajib dilakukan adalah pemutakhiran perangkat

parkir dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sehingga, ke depan setiap titik parkir memiliki rekening khusus penerimaan retribusi.

Selain itu, Dishub juga diminta bekerja sama dengan outlet atau pelaku usaha terdekat untuk penyediaapenyediaaJaringan nirkabel ini guna mendukung transaksi non-tunai masyarakat.

"SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," tuturnya.

Politisi dari Fraksi Golkar ini optimistis, penerapan parkir non-tunai dapat menjawab keraguan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Ia menilai metode pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan berhasil diterapkan luas di berbagai sektor.

"Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ucapnya.

Ia bahkan memperkirakan, jika kebijakan ini berjalan optimal,

pendapatan parkir tepi jalan yang selama ini rata-rata hanya sekitar Rp20 miliar per tahun dapat meningkat signifikan. enurut hitungannya bisa menjadi Rp50 miliar–60 miliar per tahun. Tak hanya itu digitalisasi ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

Satgas Antipreman Beri Rasa Aman

Terkait pembentukan Satgas Antipreman, Fathoni menilai kehadirannya menjadi instrumen penting untuk menjamin rasa aman dalam implementasi parkir non-tunai. Satgas ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri dalam mencegah serta menindakpraktikpremanisme.

"Kalau sudah ditetapkan non-tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini Pemkot kerap menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Dengan adanya satgas lintas institusi, tindakan premanisme, termasuk penolakan sistem parkir non-tunai atau pemaksaan tarif, dapat ditangani secara tegas.

Selain itu, Fathoni mengingatkan pentingnya kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar kebijakan ini berhasil. Ia menyoroti perlunya peran camat dan lurah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan.

"Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tambahnya.

Menurutnya, pembentukan Satgas Antipreman yang diinisiasi Wali Kota Surabaya merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, termasuk pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

"Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," pungkasnya.(adv,ama/dya)



Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone."

ARIF FATHONI

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya,